PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019-2024

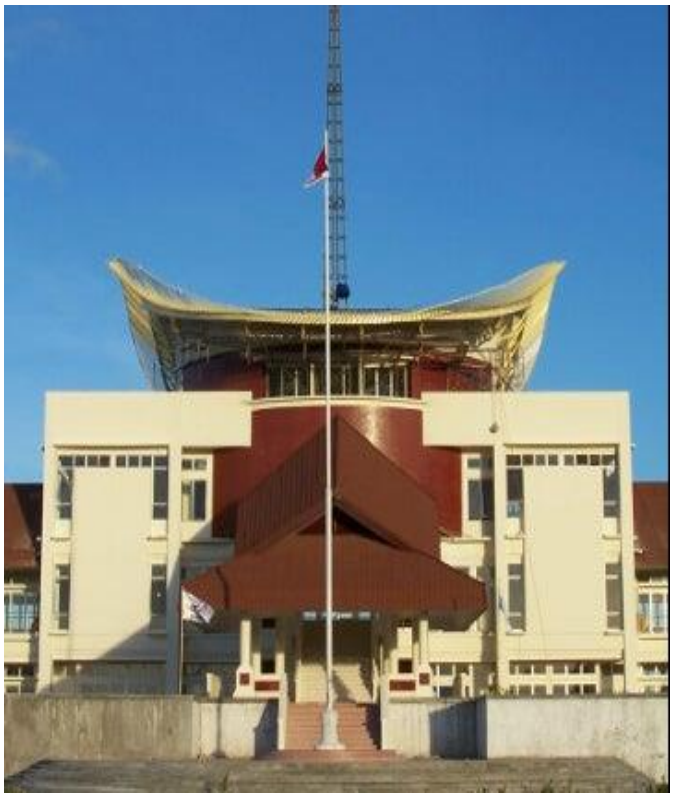

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 telah mengalami perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 036); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002).

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(3) Penjabaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
h. BAB VIII : PENUTUP.

(4) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial;
h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Dinas Perikanan;
t. Lampiran XX : Rencana Strategis Dinas Pertanian;
u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Dinas Peternakan;
v. Lampiran XXII : Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
w. Lampiran XXII.1 : Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
x. Lampiran XXII.2 : Rencana Strategis Bagian Hukum;
y. Lampiran XXII.3 : Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
z. Lampiran XXII.4 : Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
aa. Lampiran XXII.5 : Rencana Strategis Bagian Organisasi;
bb. Lampiran XXII.6 : Rencana Strategis Bagian Umum;
cc. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
dd. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Badan Perencanan, Penelitian dan Pengembangan;
ee. Lampiran XXV : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
ff. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
gg. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
hh. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
ii. Lampiran XXIX : Rencana Strategis Inspektorat;

jj.	Lampiran XXX	:	Rencana Strategis Kecamatan Lobalain;
kk.	Lampiran XXXI	:	Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut;
ll.	Lampiran XXXII	:	Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Daya;
mm.	Lampiran XXXIII	:	Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat;
nn.	Lampiran XXXIV	:	Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan;
oo.	Lampiran XXXV	:	Rencana Strategis Kecamatan Rote Tengah;
pp.	Lampiran XXXVI	:	Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru;
qq.	Lampiran XXXVII	:	Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur;
rr.	Lampiran XXXVIII	:	Rencana Strategis Kecamatan Ndao Nuse;
ss.	Lampiran XXXIX	:	Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko;
tt.	Lampiran XXXX	:	Rencana Strategis Kecamatan Loaholu; dan
uu.	Lampiran XXXXI	:	Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Uraian lebih lanjut sistematika Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Mengesahkan
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

HANCKY J. MOOY, SH, M.Si
NIP. 19641[illegible]

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 30 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 055

LAMPIRAN XXII.3

PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

KATA PENGANTAR

Memasuki abad ke – 21, sejarah kepemerintahan Indonesia telah mengalami banyak perubahan mendasar, baik pada aras penyelenggaraan pemerintahan nasional maupun pemerintahan daerah. Sendi-sendi kehidupan berdemokrasi dan berpolitik mulai dibenahi secara konseptual dan sistemik dengan satu tujuan utama, yakni meresapmasukkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dalam semua aspek perikehidupan bernegara, dengan tetap memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap pluralisme, entitas budaya dan adat-istiadat masyarakat lokal.

Melalui konstruksi tatanan hubungan kepemerintahan yang berbasis otonomi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan Aparatur Pemerintah yang bekerja secara profesional, rasional, kreatif, efisien, tidak memihak serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kode etik pemerintahan.

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara Konseptual, Rencana Strategi merupakan pernyataan langkah tindak terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satuan Kerja. Pernyataan indikatif terukur ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ditargetkan akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun dengan didukung oleh sumber daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun sumber daya manusia.

Dengan demikian diharapkan Rencana Strategi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ini dapat menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kepemerintahan yang baik di Kabupaten Rote Ndao pada Umumnya Khususnya Bidang Urusan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao sesuai TUPOKSI.

Ba'a, 30 November 2021
Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao,

Dra. Endang Pristiwati, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670412 199203 2 014

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistimatika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 21
3.1 Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 21
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 22
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah 24
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 24
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 26
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 27
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... 30
6.1 Program 30
6.2 Kegiatan 30
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 38
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 38
BAB VIII PENUTUP 40

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Susunan Kepegawain Berdasarkan Pangkat dan Golongan 10
Tabel 2.2 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan 11
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana 11
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 13
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 16
Tabel 2.6 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao Terhadap Sasaran Renstra K/L 18
Tabel 2.7 Hubungan Perangkat Daerah dengan RTRW Kab. Rote Ndao..... 20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 22
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 23
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah 24
Tabel 3.4 Permasalahn Pelayanan berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang..... 24
Tabel 3.5 Permasalahn Pelayanan berdasarkan Analisis KLHS 25
Tabel 3.6 Identifikasi Isu-isu strategis (Lingkungan Eksternal)..... 25
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Jangka Menengah Pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao 26
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao 29
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 31
Tabel 7.1 Indikator Kinerja (IKU) OPD yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 39

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencananaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, yang implementasi operasionalnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Di dalam Peraturan Bupati Rote Ndao tersebut, juga termuat Renstra Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih Tahun 2019-2024 untuk Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan Nomenklatur OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun namun dapat dilakukan penyesuaian sepanjang adanya dasar perubahan. Dalam hal adanya Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai acuan bagi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 sampai tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021.
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao adalah :

a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
b. Penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
c. Penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
d. Sebagai payung hukum terhadap penyusunan Renja dan Perubahan Renja Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024

1.3.2. Tujuan

Rancangan Perubahan Renstra Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan:

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
b. Meningkatkan pemahaman tentang manfaat Laporan Penyelenggaraan Program/Kegiatan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Inflasi, database potensi sumberdaya alam), dan Pembangunan (Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung APBD, Pembangunan Fisik Konstruksi) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
c. Sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
d. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Perubahan Renstra Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.3 Telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Prov/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Stuktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Merencanakan operasional program dan kegiatan bagian perekonomian dan adminitrasi pembangunan meliputi pembinaan badan usaha milik daerah, perekonomian, sumber daya alam serta administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan administrasi bagian dan tercapainya tujuan pengembangan ekonomi daerah, pembangunan dan sumber daya alam.

2.1.2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud diatas, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, perangkat daerah ini merupakan salah satu bagian yang berada di Sekretariat Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang menduduki Eselon III-a dan berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yakni : Sub Bagian Perekonomian & SDA, Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD dan Sub Bagian Administrasi Pembangunan. Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Secara lengkap Stuktur Organisasi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dapat di lihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi (sesuai Perbup No. 37 Tahun 2020)

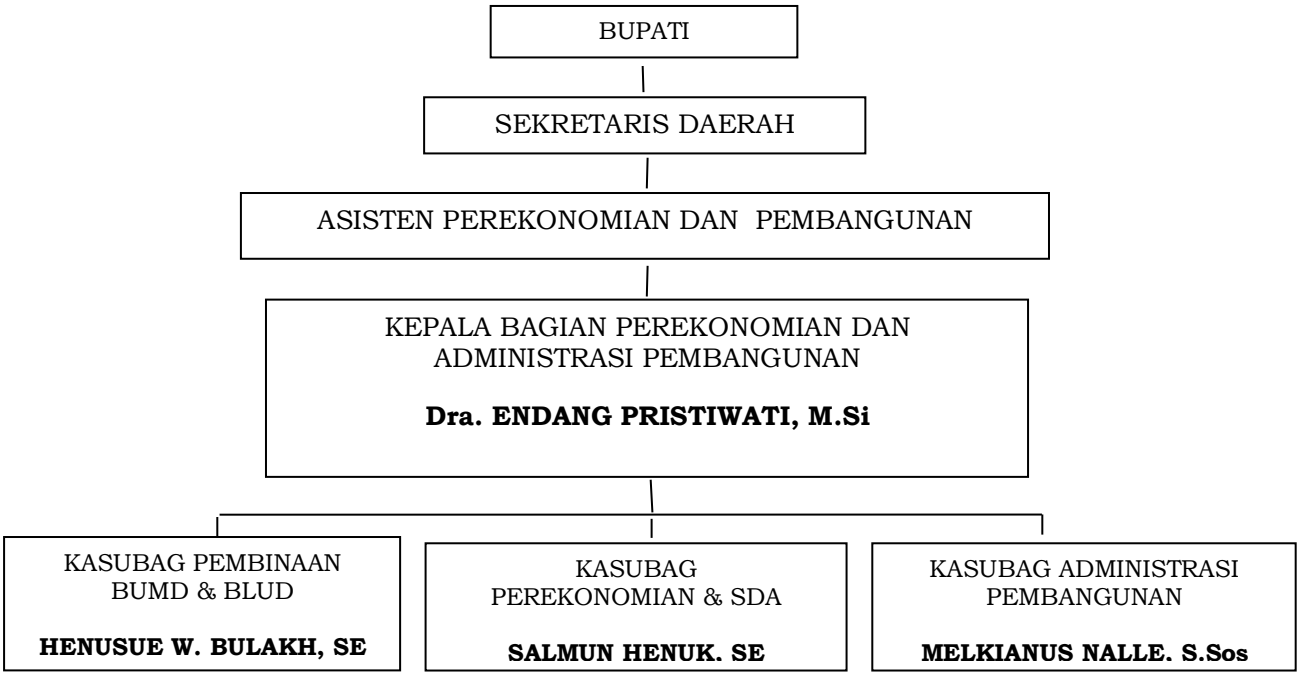

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao didukung oleh 8 orang PNS dengan klasifikasi kepangkatan/golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

a. Golongan IV : 1 orang
b. Golongan III : 5 orang
c. Gol.II : 2 orang

Pendidikan :

a. S3 : -
b. S2 : 1
c. S1 : 5 Orang
d. Diploma : -
e. SLTA : 2 orang

Susunan kepegawaian Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.1. dan Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA BAGIAN	PANGKAT GOLONGAN								JUMLAH
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	1	4	1	-	2	-	-	8
	Jumlah	-	1	4	1	-	2	-	-	8

Tabel 2.2

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	NAMA BAGIAN	TINGKAT PENDIDIKAN														JLH
		S3		S2		S1		DIPL		SLTA		SLTP		SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Perekonomian dan Adm. Pembanguna				1	4	1				2					8
	Jumlah				1	4	1				2					8

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao yang tercantum dalam daftar asset, sebagian adalah sarana dan prasarana yang berada dan dipergunakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Hal tersebut karena karena sampai dengan saat ini belum dilakukan pemisahan aset sejak Bagian tersebut terbentuk pada bulan September tahun 2019. Sarana prasarana tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Sarana Dan Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Kursi Kerja	6	√	-	-
2.	Meja Kerja	18	√	-	-
3.	Mesin Ketik	5	√	-	-
4.	Lemari Kayu	8	√	-	-
5.	Kipas Angin	3	-	-	√
6.	Printer	7	√	-	-
7.	Camera + Attachmeat	1	-	-	√
8.	Proyertor + Attachmeat	2	-	-	√
9.	White board	1	-	-	√
10.	Dispenser	1	-	-	√
11.	Note book	9	√	-	-
12.	UPS	16	-	-	√

13.	Camera Film	2	-	-	√
14.	Filing Besi/Metal	2	√	-	-
15.	Pc. Unit/Komputer PC	10	√	-	-
16.	Laptop	8	√	-	-
17.	Sepeda Motor	7	√	-	-
18.	Brand Kas	1	√	-	-
19.	Digital	1	√	-	-
20.	Filing Kayu	1	√	-	-
21.	Meja Biro	4	√	-	-
22.	Server	4	√	-	-
23.	AC. Split	1	-	-	√
24.	Server	2	√	-	-
25.	Router	3	√	-	-
26.	Harddisk eksternal	1	-	-	√
27.	Faxsimile	1	-	-	√
28.	Scanner	1	-	-	√
29.	Air Conditioning Unit	1	-	-	√
30.	Genset	1	√	-	-
31.	Local Area Network (LAN)	1	√	-	-
32.	Peralatan Jaringan lain-lain	4	√	-	-
33.	Wireles Acses point	1	√	-	-
34.	Pesawaat Telephone	1	-	-	√
35.	Kabel Listrik	1	-	-	√
36.	Mesin Hitung Manual	1	-	-	√
37.	Lemari Kaca	1	√	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan maka ada beberapa capaian kinerja berdasarkan indikator yang dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagiani Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2019-2024

NO.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bagian Ekbang Tahun Ke-					Realisasi Capian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pengendalian Pembangunan Fisik di Kabupaten Rote Ndao.			100%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
2	Jumlah data penunjang sistim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan			100%	52	52	44	44	44	52	52	44	44	44	100	100	100	100	100
3	Jumlah Kelompok Kerja ULP			100%	12	15	16	14	14	12	15	16	14	14	100	100	100	100	100
4	Jumlah buku realisasi belanja langsung APBD dan laporan monitoring fisik proyek			100%	52	52	44	44	44	52	52	44	44	44	100	100	100	100	100
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Sistim Informasi Secara Elektornik			100%	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	100	100	100	100	100
6	Jumlah rapat koordinasi antar instansi terkait yang dilaksanakan			100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Jumlah Buku Profil Potensi SDA yang dihasilkan			100%	150	100	50	50	50	150	100	50	50	50	100	100	100	100	100

8	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (RTS-PM) pada desa/kelurahan			100%	12.992	12.992	14.291	14.291	0	14.291	14.291	14.291	14.291	0	110	110	100	100	0
9	Jumlah Rapat Koordinasi Gemala antar Instansi Pemerintah			100%	4	4	4	0	0	4	4	4	0	-	100	100	100	0	0
10	Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Rote Ndaao			100%	3	3	3	0	0	3	3	3	0	-	100	100	100	0	0
11	Jumlah Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			100%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	0
12	Jumlah Rapat Koordinasi dan Pengendalian Forum Pengembangan Ekonomi			100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	0
13	Jumlah Rapat Koordinasi dan Pengendalian Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan khas daerah			100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	0
14	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah			100%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	0

Dalam rangka pencapaian kinerja tersebut diatas, pada periode Renstra sebelumnya telah dialokasikan anggaran selama 5 (lima) tahun dengan jumlah yang bervariasi sesuai kebutuhan OPD. Walaupun tidak semua realisasi anggaran mencapai 100% setiap tahunnya, namun realisasi kinerjanya mencapai 100%.

Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2014-2019

Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bagian Ekbang		Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi tahun Ke				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Proram/Kegiatan	**Indikator**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan adminitrasi kantor	850.320	850.320	4.923.000	4.923.000	4.923.000	850.320	850.320	4.923.000	3.393.000	0	100	100	100	69	0
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas	Terpelihara dan berfungsinya kendaraan Dinas	2.006.000	2.006.000	6.800.000	6.800.000	3.000.000	1.354.800	2.006.000	3.489.000	6.800.000	0	68	100	51	100	0
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola APBD	33.480.000	33.480.000	40.400.000	40.400.000	37.950.000	33.480.000	33.480.000	40.400.000	20.900.000	0	100	100	100	52	0
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Suasana Kantor yang nyaman dan bersih	600.000	600.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000	600.000	600.000	3.036.500	3.231.000	0	100	100	94	100	0
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan dan Perlengapan Kerja	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.929.000	2.000.000	2.000.000	3.585.000	2.600.000	0	100	100	72	52	0
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	10.917.600	10.917.600	16.300.625	16.300.625	23.150.100	10.917.600	10.917.600	16.281.300	4.192.000	0	100	100	100	26	0
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan,Penggandaan dan Jilid	7.962.575	7.962.575	3.000.000	18.630.000	18.370.500	7.962.575	7.962.575	2.890.500	2.898.700	0	100	100	96	16	0
8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12.010.000	12.010.000	64.502.000	31.610.400	27.610.400	10.770.000	12.010.000	64.204.600	19.219.200	0	90	100	100	61	0
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Operasional Kegiatan	9.150.000	9.150.000	57.842.000	42.709.000	42.610.000	9.150.000	9.150.000	57.212.000	21.953.000	0	100	100	99	51	0
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	16.809.000	16.809.000	28.602.200	28.602.200	28.602.000	16.809.000		28.509.500	21.077.000	0	100	-	100	74	0
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
1. Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur	Tersedianya Aparatur yang memiliki pengetahun dan ketrampilan			103.304.250	28.602.200	0			90.605.500	0	0	-	-	-	0	0
IV. Program Penyebarluasan Informasi Daerah																
1. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	Tersedianya Layanan Pengadaan secara Elektronik	294.223.450	294.223.450	220.092.000	248.420.400	243.070.400	274.216.153	294.223.450	202.916.900	107.690.200	0	93	100	92	43	0
V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
1. Monitoring Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengendalian pembangunan daerah	221.999.200	221.999.200	343.219.166	343.219.000	343.219.000	215.659.000	221.999.200	322.590.000	213.048.600	0	97	100	94	62	0

VI. Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.																
1. Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan	Terlaksananya pengendalian dan pelaporan	301.218.500	301.218.500	346.598.500	346.598.500	332.748.500	291.664.000	301.218.500	343.388.500	343.388.500	0	97	100	99	99	0
2. Sistem Monitoring Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	Terlaksananya Sistim Monev penyerapan anggaran	75.000.000	75.000.000	71.159.500	71.159.500	71.159.500	74.396.300	75.000.000	64.167.000	64.167.000	0	99	100	90	90	0
3. Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan	Tersedianya Oerasional ULP	130.000.000	130.000.000	65.759.700	94.088.100	99.488.100	124.778.000	130.000.000	63.552.900	63.552.900	0	96	100	97	68	0
4. Fasilitasi Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP)	Terlaksananya percepatan pembangunan	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
VII. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.																
1. Peningkatkan produksi dan produktivitas SDA	Adanya hasil pembahasan tentang upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas SDA	57.479.500	57.479.500	37.500.000	27.500.000	27.500.000	56.752.950	57.479.500	37.500.000	37.500.000	0	99	100	100	136	0
2. Tersusunnya buku profil potensi	Tersedianya Buku Profil Potensi SD	29.656.000	29.656.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		29.656.000	12.000.000	12.000.000	0	-	100	100	100	0
VIII. Program Pengendalian dan Penanganan Bantuan Kesejahteraan Sosial											0					
1. Sosialisasi pengadaan, pendistribusian dan pengamanan RASTRA	Terlaksananya sosialisasi pengadaan, pendistribusian dan pengamanan RASTRA	525.134.952	525.134.952	315.000.000	271.367.800	315.000.000	518.002.352	525.134.952	315.000.000	315.000.000	0	99	100	100	116	0
IX. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekositem Pesisir dan laut																
1. Koordinasi data gemala antar Instansi Pemerintah	Terlaksananya Koordinasi data gemala antar Instansi Pemerintah	60.378.000	60.378.000	35.000.000	0	0	59.617.000	60.378.000	35.000.000	0	0	99	100	100	0	0
2. Konservasi Perairan Kabupaten Rote Ndao	Terlaksananya Konservasi Perairan Kabupaten Rote Ndao	106.367.800	106.367.800	135.000.000	0	0	97.338.050	106.367.800	135.000.000	0	0	92	100	100	0	0
X. Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah																
1. Pembinaan badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Pembinaan badan Usaha Milik Daerah	31.350.000	31.350.000	50.000.000	50.000.000	49.100.000	31.350.000	31.350.000	50.000.000	50.000.000	0	100	100	100	100	0
XI. Program Pengendalian dan Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi																
1. Rapat Koordinasi dan Pengendalian Forum Pengembangan Ekonomi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pengendalian Forum Pengembangan Ekonomi	49.671.600	49.671.600	50.000.000	0	0	39.691.600	49.671.600	50.000.000	0	0	80	100	100	0	0
2. Rapat Koordinasi dan Pengendalian Pengembangan Promosi dan pemasaran Produk Unggulan khas daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pengendalian Pengembangan Promosi dan pemasaran Produk Unggulan khas daerah	30.761.315	30.761.315	50.000.000			27.663.515	30.761.315	50.000.000	0	0	90	100	100	0	0
3. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi	29.996.990	29.996.990	50.000.000	50.000.000	49.100.000	29.996.990	29.996.990	50.000.000	50.000.000	0	100	100	100	100	0
											0					

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan

1. Perubahan aturan dan adanya inkonsistensi penerapan aturan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Sikap egosektoral antar instansi yang menghambat koordinasi pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya pandemic Covid yang berdampak pada revisi kegiatan dan keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan program/kegiatan pembangunan serta keterlambatan dimulainya kegiatan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
4. Belum cermatnya pembuatan Rencana Anggaran Kas OPD sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran tidak tepat waktu.
5. Mekanisme pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan belum dijalankan secara konsisten oleh Instansi/Organisasi Perangkat Daerah karena masih beragamnya sistem pelaporan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
6. Belum maksimalnya tingkat penyerapan dana dan realisasi fisik hingga akhir tahun anggaran.
7. Belum terciptanya kesamaan persepsi mengenai pentingnya pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten.

2) Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan tentang pembagian urusan pemerintahan.
2. Meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatnya perhatian terhadap pengembangan kawasan Timur Indonesia, termasuk Kabupaten Rote Ndao.

Gambaran hubungan OPD dan Renstra OPD Provinsi,Kementrian/Lembaga dan Gambaran hubungan OPD dengan RTRW Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6				
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Perekonomian dan Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao Terhadap Sasaran Renstra K/L				
NO.	**Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD**	**Capaian Sasaran SKPD**	**Sasaran Renstra SKPD Provinsi**	**Sasaran Renstra K/L**
(1)	**(1)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**			
	1. Tersedianya Sistem Monitoring Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	Adanya Sistem Monitoring Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang pembangunan lintas Kabupaten/Kota	
2	**Program Penyebarluasan Informassi Pemerintah Daerah**			
	1. Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang pembangunan lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang Pembangunan lintas Prov
3	**Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.**			
	1. Tersedianya Data dan Informasi Program Kegiatan APBD dalam bentuk Pelaporan	1.Adanya Data dan Informasi Program Kegiatan APBD dalam bentuk Pelaporan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang pembangunan lintas Kabupaten/Kota	
	2. Tersedianya Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)	2.Adanya Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang ekonomi lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang Pembangunan lintas Prov
4	**Program Pengendalian dan Penanganan Bantuan Kesejahteraan Sosial**			
	1. Terlaksananya sosialisasi pengadaan, pendistribusian dan pengamanan RASTRA	Adanya sosialisasi pengadaan, pendistribusian dan pengamanan RASTRA	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang ekonomi lintas Kabupaten/Kota	
5	**Program Koordinasi Pengendalian dan Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi**			

	1.Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	adanya Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang ekonomi lintas Kabupaten/Kota	
6	**Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir**			
	1. Terlaksananya Koordinasi data GEMALA antar Instansi	Adanya Koordinasi data GEMALA antar Instansi	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang ekonomi lintas Kabupaten/Kota	
	2. Terlaksananya Konservasi Perairan Kabupaten Rote Ndao	Adanya Konservasi Perairan Kabupaten Rote Ndao	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program bidang ekonomi lintas Kabupaten/Kota	

Tabel.2.7.
Hubungan Perangkat Daerah dengan RTRW Kab. Rote Ndao

NO.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
	TIDAK ADA	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak ada**

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap OPD harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD tersebut. Adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan antara lain :

a. Kurang adanya pemahaman tentang manfaat Laporan Penyelenggaraan Program/Kegiatan di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian (Inflasi) dan Sumber Daya Alam (Potensi Sumber Daya Alam dan pengawasannya), dan Administrasi Pembangunan (Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung APBD & informasi kegiatan pembangunan fisik konstruksi) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
b. Belum tersedianya data dan informasi terkini secara memadai di OPD baik data potensi sumber daya alam maupun data dan informasi pembangunan.
c. Kurang tersedianya sumber daya manusia aparatur secara kuantitas dan kualitas.
d. Sarana dan prasarana kerja yang masih kurang memadai.

Dari permasalahan tersebut upaya-upaya yang perlu di lakukan antara lain :

1. Memberi pemahaman kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, pentingnya laporan kemajuan penyerapan anggaran dan fisik keuangan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan pada tingkat kabupaten dan provinsi.
2. Dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia maka di butuhkan adanya peningkatan mutu aparat melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik pendidikan teknis fungsional, maupun pendidikan lainnya yang dapat mendukung/menunjang tugas dan fungsi sebagai aparatur.
3. Memberikan pemahaman pentingnya pengelolaan data dan informasi terkini sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai agar efektivitas pelayanan masyarakaat dapat berjalan dengan baik.

Dari beberapa permasalahan tersebut yang menjadi masalah pokok yang prioritas harus diatasi untuk mendukung meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah ini seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*
1.	Belum optimalnya Kinerja Pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Kurang kreatifitas serta disiplin pegawai dalam menjalankan tupoksi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2015-2019, yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan" yang dijabarkan dalam 4 (empat) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

Sesuai tupoksi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao adalah mendukung misi ke - 4 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima yang didukung dengan program utama, yaitu "Program Perekonomian dan Pembangunan"

Dalam rangka mencapai misi tersebut maka terdapat faktor penghambat dan pendorong yang di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan ".

NO	Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima			
	1. Program : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	terbatasnya sumber data baik primer maupun sekunder	Alokasi dana yang terbatas	Profil Potensi Sumber Daya Alam
	2. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	kurang cermatnya perencanaan pembangunan Fisik Konstruksi	- Terbatasnya Konsultan Perencana	Mensosialisasikan kepada pihak ketiga agar berminat menjadi Konsultan Perencana
			- Alokasi dana yang terbatas	
	3. Program : Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Belum optimalnya Layanan Pengadaan secara Elektronik untuk Pokja ULP dan Penyedia	Terbatasnya Infrastruktur penunjang LPSE	Tersedianya infrastruktur penunjang
	4. Program : Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Belum berjalannya jabatan fungsional Murni Pengadaan Barang/Jasa	-Belum tersedianya regulasi ditingkat daerah	Aparatur yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya, infrastruktur yang memadai dan adanya regulasi yang mendukung
	5. Program : Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	terbatasnya sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah	Alokasi dana yang terbatas	Penyertaan Modal Pemerintah untuk BUMD
	6. Program : Pengendalian Penanganan Bantuan Kesejahteraan Sosial	Belum Semua KK miskin sebagai Rumah Tangga Sejahtera Penerima Manfaat	Belum Validnya Data Keluarga Penerima Manfaat dari BPS	Pendataan ulang Basis Data Terpadu
	7. Program : Koordinasi Pengendalian dan Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi	kurang koordinasi antar stakeholder terkait	Alokasi dana yang terbatas	terbentuknya Tim Inflasi Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan OPD Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kab.Rote Ndao Berdasar Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	-	Pelaporan berkala progres fisik keuangan pelaksanaan pembangunan tahun berjalan	kurang cermatnya perencanaan anggaran OPD pengelola kegiatan	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di tinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sajikan pada tabel 3.4. dan tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	***2***	***3***	***4***	***5***
	TIDAK ADA			

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	***2***	***3***	***4***	***5***
	Tidak ada	Tidak ada		

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk menentukan isu strategis maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu strategis lingkungan eksternal baik yang mempengaruhi dinamika internasional, dinamika nasional maupun dinamika regional/lokal dikaitkan dengan faktor-faktor pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao yang mempengaruhi faktor pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra, Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan sehingga di peroleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu-isu strategis yang harus ditangani yang kemudian menjadi tugas Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao dan diselesaikan selama 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis tersebut dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Identifikasi Isu-isu strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu-isu strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/lokal	Lain-lain
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Pengadaan Barang/Jasa	Menghambat pembangunan di daerah	
2.	Kawasan Perairan yang dilindungi	Perairan yang dilindungi	Kesinambungan sumber daya perikanan	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Bagian Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao adalah Meningkatkan Pelayanan Administrasi Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

4.1.2. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao adalah Meningkatnya pelayananan admnistrasi bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

Rancangan Target Kinerja lima tahun kedepan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran jangka menegah Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao secara rinci dapat dlihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam						
			1 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	23,43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2 Persentase BUMD yang sehat	50 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
			3 Ketersediaan Data Potensi Sumber Daya Alam	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

a. Strategi S-O:

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintahan daerah yang berorientasi pemecahan masalah (problem solving oriented) dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah berdasarkan lingkup bidang kewenangan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Rote Ndao.
3. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah untuk perbaikan kinerja dari waktu ke waktu yang diarahkan untuk melaksanakan komitmen pemerintah dalam implementasi pemberdayaan masyarakat Rote Ndao yang didukung dengan alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
5. Pemberdayaan SDM Sub Bagian- Sub Bagian melalui peningkatan kompetensi dan mutu kerja, serta pemberian rincian Tupoksi yang jelas.
6. Penerapan metode pembagian habis tugas dan pemanfaatan peralatan pendukung secara tepat guna dan tepat fungsi.

b. Strategi W-O:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran Sub Bagian-Sub Bagian, termasuk pengendalian pelaksanaannya sesuai target kinerja.
2. Peningkatan penerapan *rewards and punishment* dalam pembinaan karier PNS Sub Bagian.
3. Peningkatan Kualitas SDM Sub Bagian melalui berbagai kegiatan kursus dan Diklat yang relevan dengan Tupoksi Sub Bagian.
4. Pengadaan perangkat kerja secara selektif sesuai beban kerja dan ketersediaan anggaran.

c. Strategi S-T:

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penerapan aturan dalam pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten.
2. Peningkatan kualitas koordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten dalam penyusunan kebijakan dan keterpaduan program berdasarkan lingkup bidang kewenangan.
3. Peningkatan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Propinsi untuk penyamaan persepsi mengenai peran Kabupaten Rote Ndao
4. Peningkatan keterpaduan program dan percepatan kegiatan asistensi lintas Instansi/ Satuan Kerja Pengelola Program/ Kegiatan/ Proyek, Tim Anggaran Eksekutif dan DPRD.
5. Peningkatan koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Instansi Pengawas dan penegak hukum dalam rangka menekan kebocoran dana pembangunan.

d. Strategi W-T:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran Sub Bagian, termasuk pengendalian pelaksanaannya sesuai target kinerja.
2. Peningkatan penerapan *rewards and punishment* dalam pembinaan karier PNS.
3. Melakukan kerjasama/ kemitraan dengan pihak ketiga (Pemerintah pusat/Pemerintah Propinsi/ Negara asing/ daerah lain/ swasta)
4. Peningkatan Kualitas SDM Bagian melalui berbagai kegiatan kursus dan Diklat yang relevan dengan Tupoksi Bagian.
5. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan tupoksi.
6. Pengadaan perangkat kerja secara selektif .
7. Pendekatan persuasif dalam rangka peningkatan koordinasi dengan Pemerintah kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
8. Evaluasi berkala kinerja dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, termasuk pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Keterkaitan rumusan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan secara singkat di paparkan dalam tabel 5.1 di bawah ini

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan		
Misi 4	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima		
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	1. Peningkatan kualitas koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan	Komitmen dan konsistensi dalam pengelolaan anggaran, data, informasi dan pelaporan serta pengendalian di bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku
			2. Peningkatan trasparansi dan akuntabilitas terhadap administrasi	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan sarana dan prasarana
			3. Peningkatan pembinaan dalam hal pengawasan dan rehabilitasi pemulihan cadangan sumber daya alam	1. Peningkatan upaya pengawasan, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 2. Ketersediaan data potensi sumberdaya alam secara memadai

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao terkait bidang Pemerintahan sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan maka Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

6.1 Program

Penetapan Program mengacu pada program pada Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

Ada 2 (dua) Program Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao selanjutnya dijabarkan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

6.2. Kegiatan

Kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai sasaran target Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Rincian kegiatan yang dijabarkan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Ada 10 (sepuluh) kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi daerah yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
9. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
10. Kegiatan Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam

Rancangan Program dan Kegiatan serta pendanaan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1 a
Rencana Program, Kegiatan Pendanaan Bagian Perekonomian dan Adm. Pembangunan Setda Kab.Rote Ndao Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kenerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	4 01 4 01 03.05 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	Meningkatnya aktivitas kantor, kebersihan kantor, pengetahuan akan ekonomi, pembangunan dan SDA			**236.678**		**-**		**-**		**-**		**-**		**236.678**		
		4 01 4 01 03.05 01 01	1 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya Jasa surat menyurat, Jasa kebersihan kantor, Alat Tulis Kantor, Barang cetak dan penggandaan, Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	52.678.500	12 bulan	42.933		-		-		-		-	12 bulan	42.933	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		4 01 4 01 03.05 01 02	2 Pengadaan Sarana dan Prasara	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	44.000.000	2 unit printer	5.000		-		-		-		-	2 unit printer	5.000	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao

		4	01	4	01	03.05	01	03	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Jasa perbaikan peralatan kerja, Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.438.500	6 3 1	unit roda 2 unit printer Unit roda 4	38.798			-			-			-			-	6 3 1	unit roda 2 unit printer Unit roda 4	38.798	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		4	01	4	01	03.05	01	04	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	37.950.000	7	orang	46.050			-			-			-			-	7	orang	46.050	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		4	01	4	01	03.05	01	05	5	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Profil OPD, Renja perangkat daerah, LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi renja	-	7	dok	18.322			-			-			-			-	7	dok	18.322	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		4	01	4	01	03.05	01	06	6	Peningkatan kapasitas sumber daya	Tersedianya pakaian Motif Daerah khusus hari-hari tertentu dan Bimtek	-	15	orang	9.000			-			-			-			-	15	orang	9.000	Sekretariat Daerah	Jakarta
		4	01	4	01	03.05	01	07	7	Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	90.388.000	5 19 89	kali (luar Daerah) kali (Dalam Prov) kali (dalam Ka)	76.575			-			-			-			-	5 19 89	kali (luar Daerah) kali (Dalam Prov) kali (dalam Ka)	76.575	Sekretariat Daerah	Jakarta, Kupang, Kab. Rote Ndao
																		-													

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	2	05	4	01	03.05	19		**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam**	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam			**875.126**		**-**		**-**		**-**		**-**			**875.126**		
		4	01	4	01	03.05	19	01	1 Penyusunan Profil Potensi Sumber Daya Alam	Tersusunnya buku Profil Potensi Sumber Daya Alam	39.500.000	65	buku	23.641		-		-		-		-	65	buku	23.641	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		4	03	4	01	03.05	19	02	2 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Fisik di Kabupaten Rote Ndao oleh Forkompinda	343.219.000	3	kali	336.707		-		-		-		-	3	kali	336.707	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		4	01	4	01	03.05	19	03	3 Pengendalian dan Pelaporan	Terlaksananya pengendalian dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan	332.748.500	12	laporan	176.370		-		-		-		-	12	laporan	176.370	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao

		4	01	4	01	03.05	19	04	4	Fasilitasi Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP)	Terlaksananya pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan, pelaksanaan program unggulan prioritas Bupati dalam rangka percepatan pembanguan	450.000.000	10	laporan	296.655		-		-		-		-	10	laporan	296.655	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		4	01	4	01	03.05	19	05	5	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan terhadap BUMD,	49.100.000	2	BUMD	9.565		-		-		-		-	2	BUMD	9.565	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		4	01	4	01	03.05	19	06	6	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian inflasi	49.100.000	2	kali	32.188		-		-		-		-	2	kali	32.188	Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
									7	Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SKIP, Investor)	Terlaksananya Inklusi Keuangan dan Edukasi Percepatan Investasi Daerah	-					-		-		-		-				Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
									8	Pengendalian dan Pengawasan Eksplotasi SDA	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ekploitasi SDA	-					-		-		-		-				Sekretariat Daerah	Kabupaten Rote Ndao
		Total Anggaran													**1.196.758**		**-**		**-**		**-**		**-**			**1.196.758**		

Tabel 6.1 b
Rencana Program, Kegiatan Pendanaan Bagian Perekonomian dan Adm. Pembangunan
Setda Kab.Rote Ndao Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		KebutuhanKinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
						Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)	Target	Rp. x000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	**4**	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**																
		4 01	**Sekretariat Daerah**																
		4 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	100%				**253.205,68**		**243.882**		**239.992**		**261.491**		**998.569,75**	Bag. Ekbang Setda	Kabupaten Rote Ndao
		4 01 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					**12.920**		**12.920**		**16.000**		**17.600**		**59.440,00**		
		4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan induk dan perubahan				4 kali	9.920	4 kali	9.920	4 kali	12.000	4 Kali	13.200		45.044,00		
		4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ,LPPD dan				7 Dokume	3.000	7 Dokume	3.000	7 Dokumen	4.000	7 Dokume	4.400		14.407,00		
		4 01 01																	

		4	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah**							**42.264**			**42.647**			**46.912**			**51.603**			**183.430,57**		
		4	**01**	**01**	**2.02**	03	Pelaksanaan Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan	Tersedianya honor Pengelola APBD				0	5	orang	42.264	5	orang	42.647	5	orang	46.911,70	5	orang	51.603	5	orang	183.430,57		
					2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah**							**3.600**												**15.517,00**		
					2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya honor pengelola BMD perangkat daerah					1	orang	3.600	1	orang	3.600	1	orang	3.960	1	orang	4.356	1	orang	15.517,00		
					2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**30.000**			**30.000**			**30.000**			**33.000**			**123.002,00**		
						03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah					2	orang	30.000	2	orang	30.000	2	orang	30.000			33.000			123.002,00		
					2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat**							**130.439,68**			124.341,50			**143.134**			**154.947**			**552.863**		
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					111	Unit Lapto	23.098	11	unit lapto	17.000	1	Unit R2	25.000	11	Unit Printer unit macbo	25.000	2111	Unit Printer unit macboo	90.098,00		
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					10039646	Buku Le	15.583,18	100	96 buku,	15.583	##	buku	17.200	100	buku	18.920	400	buku	67.286,18		
						07	Penyediaan Barang Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor dan jasa kebersihan					12	bulan	16.785,50		12 bulan	16.785,50	12	bulan	18.464	12	bulan	20.310	48	bulan	72.345,40		
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam kabupaten, Provinsi dan Luar Provinsi					1465	kali Luar Prov. Kal	74.973,00	2465	kali Luar Prov	74.973	2465	kali Luar Prov kali dlm	82.470	24100	kali Luar Prov kali dlm Prov	90.717	71629 5	kali Luar Prov kali dlm Prov hari dlm	323.133,00		
					2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Pennunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1.793**			**1.973**			**1.973**			**2.170**			**7.909,30**		
						01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan penyediaan					12	Bulan	1.793	12	Bulan	1.973	12	Bulan	1.973	12	Bulan	2.170	48	bulan	7.909,30		
					2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**32.189**			**32.000**			**35.000**			**36.300**			**129.178**		
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan					18	unit R4 uni	29.878	18	unit R4 uni	30.000	18	unit R4 unit R2	33.000	18	unit R4 unit R2	36.300	18	unit R4 unit R2	**129.178,00**		
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja					9	kali	2.311	4	unit	2.000	4	unit	2.000	4	unit	2.200	10	unit			

				03			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Meningkatnya Pelayanan administrasi perekonomian, pembangunan dan**									**964.269**			**1.078.485**			**1.221.424**			**4.010.762,32**		
					2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan**						**47.758,90**			**196.919**			**235.000**			**293.590**			**705.167,90**		
						01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Pembinaan terhadap BUMD				2	BUI	17.919,70	2	BUMD	17.919	2	BUM	185.000	2	BUMD	203.500	2	BUMD	424.338,70		
						02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Pengendalian Inflasi				2	Laporan	29.839,20	2	Laporan	29.000	2	Laporan	31.900	2	Laporan	35.090	8	Laporan	125.829,20		
						03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (TPAKD)	Meningkatnya akses layanan keuangan dan permodalan kepada				0		-	4	Kali	50.000	4	Kali	50.000	4	Kali	55.000	16	Kali	155.000,00		
						04	Kebijakan Pendirian BUMD	Bertambahnya BUMD				0		-	1	1 BU	100.000		-				-					
					2.02		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Meningkatnya Pelayanan administrasi pembangunan**						**680.925,92**			**681.350**			**749.485**			**824.434**			**2.936.194**		
						01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Bupati, dan perencanaan, penyanggahan				10	Dokumen	230.232,84	10	Dokumen	230.200	10	Dokumen	253.220	10	Dokumen	278.542	40	Dokumen	992.194,84		
						02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Monev dan Pengendalian Pembangunan				3	kali	297.185	3	kali	297.150	3	kali	326.865	3	kali	359.552	12	kali	1.280.751,50		
						03	Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan pengendalian dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan				12	laporan	153.508,08	12	laporan	154.000	12	laporan	169.400	12	laporan	186.340	48	laporan	663.248,08		
					2.04		**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam**	**Tersedianya Profil dan Pengendalian Pengawasan Sumber Daya**						**43.000**			**43.000**			**47.000**			**51.700**			**184.700**		
						02	Koordinasi, Sinkroniasai dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sumber daya alam dan tersusunnya Profil Potensi Sumber Daya Alam				1250	bulan buku	43.000	1250	bulan buku	43.000	1250	bulan buku	47.000	1250	bulan buku	51.700	48200	bulan buku	184.700,00		
								TOTAL						**1.067.891**			**1.208.151**			**1.318.477**			**1.482.914**			**5.009.332,07**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024, maka Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menetapkan indikator Kinerja yang akan di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD tersebut. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk perjanjian kinerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah Daerah setiap tahun melalui dokumen LKIP Tahunan dan LKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Indikator Kinerja Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019-2024 yang terdiri dari 3 (tiga) indikator. Adapun indikator kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu.
2. Persentase BUMD yang sehat.
3. Ketersediaan Data Potensi Sumber Daya Alam.

Rincian target masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Presentase perangkat Daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	23,43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Presentase BUMD yang sehat	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Ketersediaan Data Potensi Sumber Daya Alam	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan penjabaran Rencana tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah maupun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan perubahan kekinian yag mengemuka saat penyusunan rencana tahunan tersebut. Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

Hasil pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIP), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dengan menilai efesiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Ba'a, 30 November 2021

Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao,

Dra. Endang Pristiwati, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670412 199203 2 014